



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji serta Syukur Kehadirat Allah SubhanaWata'ala atas Rahmat dan Hidayahnya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini merupakan rencana pembangunan Tahunan DPMD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan, dengan harapan semua rencanadapat terpenuhi sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Moga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

H. AHMAD KHUSAIRI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19720913 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iii

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4	Sistematika Penulisan	I-4

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	II-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-17
2.3.1	Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.3.2	Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	II-18
2.3.3	Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir	II-21
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-3

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.1.1	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional .	III-1
3.1.2	Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	III-4
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-4
3.3	Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	IV-1
BAB V	PENUTUP.....	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	II-2
Tabel 2.2	II-14
Tabel 2.4	II-16
Tabel 2.5	II-19
Tabel 2.6	II-23
Tabel 3.1	III-1
Tabel 3.2	III-5
Tabel 3.3	III-6
Tabel 4.1	IV-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	I-1
------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

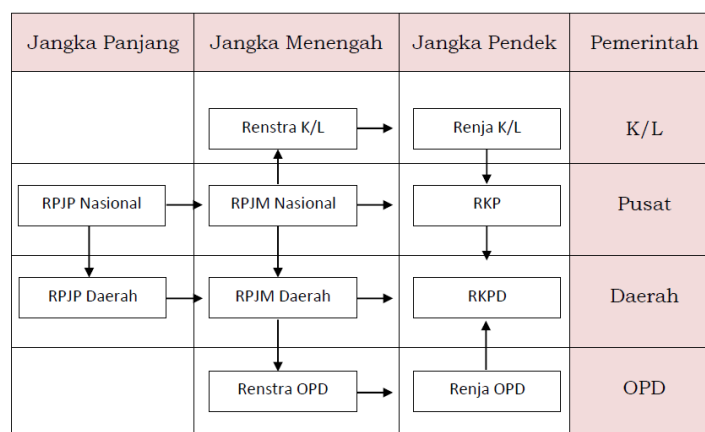
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 ini merupakan instrumen penting dan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (Nama Perangkat Daerah).

Penyusunan Renja ini memiliki kedudukan strategis sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah [Nama Perangkat Daerah] periode 2025-2029 dan merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Renja-PD ini disusun sebagai panduan kerja tahunan Perangkat Daerah dan telah melalui serangkaian proses penyusunan diantaranya (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, serta (5) Perumusan Rancangan Akhir.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan yang lebih luas, yaitu keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen Renstra-PD, dengan Renja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Renja provinsi/kabupaten/kota terkait.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh sumber daya, program, kegiatan, dan subkegiatan dapat diarahkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) [Nama Perangkat Daerah] Tahun [Tahun Perencanaan] didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419)
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 5);
- 15) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026;
- 16) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja-PD adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang definitif dan final, yang menjadi pedoman operasional

dan alat pengendalian bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Sementara tujuan penyusunan Renja-PD ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan dan menterjemahkan sasaran dan indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan yang lebih terperinci.
- 2) Memastikan keselarasan (koordinasi dan konsistensi) antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2026.
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja tahunan dalam rangka mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra-PD.
- 4) Menjamin ketersediaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang efektif dan efisien untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menyajikan identifikasi dan analisis mendalam terhadap isu-isu krusial yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk menghasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses peninjauan ulang (review) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk memastikan bahwa usulan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah telah selaras dengan arah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian yang dilakukan Perangkat Daerah terhadap usulan program/kegiatan yang diajukan oleh berbagai pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Uraian penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Menyajikan penjelasan naratif mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun perencanaan untuk memberikan konteks dan justifikasi terhadap rumusan program dan kegiatan yang diusulkan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta indikator kinerja dan alokasi pendanaan tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan uraian penutup, berupa catatan penting, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menetapkan landasan analitis bagi perumusan rencana kerja tahun berjalan dengan menyajikan hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun sebelumnya (2024) dan tahun berjalan (2025). Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi isu-isu kritis, serta merumuskan rekomendasi strategis yang mengarahkan perencanaan tahun 2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah mengaitkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk menetapkan landasan data yang kuat terhadap perumusan isu-isu penting, [Nama Perangkat Daerah] menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Perkiraan Capaian Kinerja hingga Tahun Berjalan (Tahun 2025). Evaluasi ini mengukur secara terperinci tingkat keberhasilan setiap Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah, serta menghitung persentase pencapaian terhadap target Renstra. Hasil komparasi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja (performance gap) yang akan dianalisis lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Tabel berikut menampilkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 Persen		90 Persen	90 Persen	100 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	8 Dokumen	16 Dokumen	100 Persen

2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	2 Laporan	66,66 Persen
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	32 Orang	12 Bulan	100 Persen
2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	66,66 Persen
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	100 Persen		0	0	0	0	0	0
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		0	0	0	0	0	0
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang		0	0	0	0	0	0
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	100 Persen	6 Paket	12 Paket	100 Persen
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	100 Persen	7 Paket	14 Paket	100 Persen
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100 Persen	3 Paket	6 Paket	100 Persen
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	100 Persen	24 Paket	48 Paket	100 Persen
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	4 Dokumen	33,33 Persen
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	2 Laporan	100 Persen

2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit		0	0	0	0	0	0
2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		0	0	0	0	0	0
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		5 Unit	1 Unit	20 Persen	5 Unit	6 Unit	40 Persen
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit							
2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		5 Unit	4 Unit	80 Persen	5 Unit	9 Unit	60 Persen
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	2 Laporan	66,66 Persen
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	2 Laporan	66,66 Persen
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	2 Laporan	66,66 Persen
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	100 Persen	8 Unit	16 Unit	100 Persen
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100 Persen	0	3 Unit	100 Persen
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100 Persen	6 Unit	12 Unit	100 Persen

	Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas								
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	100 Persen		80,7 Persen	80,7 Persen	100 Persen	80,7 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang tertata dengan baik	197 Desa		159 Desa	159 Desa	100 Persen	159 Desa	197 Desa	100 Persen
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	17 Desa		17 Desa	17 Desa	100 Persen	17 Desa	34 Desa	100 Persen
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	7 Unit		3 Desa	3 Desa	100 Persen	3 Desa	6 Desa	85,71 Persen
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 Persen		0	0	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi	20 Kecamatan		0	0	0	20 Desa	20 Desa	100 Persen
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	19 Dokumen		0	0	0	0	0	0
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15 Dokumen		0	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	20 Persen
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	100 Persen		80,7 Persen	80,7 Persen	100 Persen	80,7 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi Baik	197 Desa		159 Desa	159 Desa	100 Persen	159 Desa	197 Desa	100 Persen
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	197 Desa		159 Desa	159 Desa	100 Persen	159 Desa	197 Desa	100 Persen
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	197 Desa		197 Desa	197 Desa	100 Persen	197 Desa	197 Desa	100 Persen
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	197 Orang		96 Orang	96 Orang	100 Persen	96 Orang	192 Orang	97,46 Persen
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	40 Laporan		0	0	0	0	0	0
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	197 Dokumen		0	0	0	197 Dokumen	197 Dokumen	100 Persen
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan	205 Dokumen		205 Dokumen	205 Dokumen	100 Persen	205 Dokumen	205 Dokumen	100 Persen

	dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa								
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	43 Laporan		0	0	0	0	0	0
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	197 Dokumen		159 Dokumen	159 Dokumen	100 Persen	159 Dokumen	197 Dokumen	100 Persen
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	197 Dokumen		197 Dokumen	197 Dokumen	100 Persen	197 Dokumen	197 Dokumen	100 Persen
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	197 Dokumen		197 Desa	197 Desa	100 Persen	197 Dokumen	197 Dokumen	100 Persen
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	132 Desa		44 Desa	44 Desa	100 Persen	44 Desa	88 Desa	66,66 Persen
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	66,66 Persen
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, R PKK, Posyandu, LPM, dan	36 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	13 Dokumen	14 Dokumen	38,88 Persen

	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	100 Persen	3 Lembaga	6 Lembaga	60 Persen
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	66,66 Persen
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	66,66 Persen
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	66,66 Persen

Terdapat Beberapa Sub Kegiatan yang Tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Sub kegiatan ini belum memenuhi target Renstra (kurang 1 dokumen) Faktor penyebab utama : Keterbatasan alokasi anggaran tahunan, sehingga penyusunan dokumen tambahan belum dapat dilakukan setiap tahun dan Perubahan kebijakan pelaporan dari pemerintah pusat (SAKIP, RB) yang membutuhkan penyesuaian format dan mekanisme. Karena baru mencapai 66,66%, terdapat beberapa dampak terhadap pencapaian target Renstra, Dampak Positifnya Laporan capaian kinerja yang telah tersusun membantu Menyusun evaluasi tahunan SAKIP secara lebih akurat dan Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ditetapkan menghasilkan sejumlah dokumen pelaporan dan analisis keuangan sesuai kebutuhan tahunan. Namun hingga tahun berjalan, beberapa target jangka menengah masih belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor penyebab belum terpenuhinya target, antara lain: Koordinasi internal terkait perencanaan–penganggaran belum seragam, terutama dalam penyampaian dokumen pendukung realisasi anggaran.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pada periode pelaksanaan Renstra, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ditujukan untuk menyediakan dokumen regulasi, bahan referensi, pedoman teknis, dan literatur pendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa target Renstra yang belum sepenuhnya tercapai Faktor penyebab tidak terpenuhinya target adalah: Fokus anggaran lebih diarahkan pada prioritas kegiatan lain, sehingga pengadaan bahan bacaan berada pada prioritas menengah.

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Pada Sub Kegiatan *Pengadaan Mebel*, realisasi kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target output yang direncanakan adalah tersedianya mebel kantor untuk mendukung operasional perangkat daerah, namun realisasi yang dicapai masih berada di bawah target tersebut.

Faktor Penyebab: Keterbatasan anggaran, sehingga volume pengadaan tidak dapat direalisasikan secara penuh.

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pada tahun berjalan, beberapa komponen sarana dan prasarana pendukung gedung kantor belum seluruhnya terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Keluaran yang tidak terpenuhi tersebut umumnya mencakup: Instalasi/perbaikan sarana utilitas (listrik, AC, jaringan komunikasi), Pengadaan fasilitas penunjang ruang kerja dan Pemeliharaan ringan bangunan. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target adalah: Keterbatasan anggaran, karena adanya penyesuaian pagu sehingga beberapa kebutuhan prioritas ditunda realisasinya.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Beberapa aspek penyediaan jasa surat menyurat pada tahun berjalan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, khususnya pada: Pengiriman surat keluar melalui jasa pos/kurir, Penyediaan dokumen pendukung administrasi surat, dan Pengelolaan layanan distribusi surat internal dan eksternal. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target adalah: Keterlambatan proses administrasi, terutama dalam penandatanganan, verifikasi, atau pengesahan dokumen.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Beberapa komponen layanan komunikasi dan utilitas belum sepenuhnya mencapai target realisasi, khususnya dalam hal: Pembayaran tagihan listrik dan air yang belum seluruhnya terakomodasi pada waktu perencanaan dan Pemeliharaan jaringan internet atau telepon yang mengalami gangguan, Faktor penyebab ketidaktercapaian target tersebut antara lain: Penyesuaian pagu anggaran, membuat sebagian pembayaran harus ditunda atau disesuaikan ulang.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Faktor penyebab ketidaktercapaian tersebut antara lain: Keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua kebutuhan operasional dapat dipenuhi sesuai rencana awal.

Sub Kegiatan : Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa Sub kegiatan yang bertujuan untuk mendukung ketersediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana serta prasarana yang dibutuhkan desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa, terdapat beberapa output yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Keterbatasan ketersediaan anggaran, karena terjadi penyesuaian

fiskal daerah dan realokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas lain. Kondisi ini menyebabkan jumlah desa yang dapat difasilitasi menjadi berkurang dari target awal.

Sub Kegiatan : Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan, beberapa output yang direncanakan belum mencapai target sepenuhnya. Ketidaktercapaian tersebut umumnya disebabkan oleh: Keterbatasan anggaran, baik akibat efisiensi belanja, realokasi anggaran, maupun penyesuaian fiskal daerah dan Kendala teknis di lapangan, termasuk akses geografis, kondisi cuaca, dan kesediaan lahan yang belum jelas.

Sub Kegiatan : Pada Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terdapat beberapa output yang tidak mencapai target yang direncanakan. Faktor-faktor utama penyebab ketidaktercapaian adalah: Keterbatasan anggaran, yang menyebabkan jumlah peserta atau desa sasaran pembinaan tidak dapat dipenuhi sesuai rencana awal.

Sub Kegiatan : Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa beberapa target kinerja tidak mencapai capaian 100%. Hal ini umumnya terjadi pada desa yang belum dapat difasilitasi secara penuh untuk penetapan maupun penegasan batas. Faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian: Keterbatasan anggaran untuk kegiatan survei lapangan, pemetaan, dan pembiayaan fasilitas teknis.

Sub Kegiatan : Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Pada pelaksanaan fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, terdapat beberapa aspek yang tidak mencapai target kinerja yang direncanakan. Ketidaktercapaian ini umumnya terjadi pada desa atau kelurahan yang belum mampu berpartisipasi atau belum memenuhi kriteria administrasi untuk mengikuti proses evaluasi. Faktor-faktor penyebab utama: Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan lomba desa/kelurahan, termasuk biaya pembinaan, transportasi tim penilai, dan penyediaan data teknis dan Desa tidak siap administrasi, terutama data profil desa, dokumen pemerintahan, laporan pembangunan, dan dokumen pendukung penilaian lainnya.

Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa target yang direncanakan dalam pembinaan LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) dan lembaga adat tidak dapat tercapai secara penuh. Ketidaktercapaian ini terutama terkait pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan secara

merata di seluruh desa/kelurahan. Faktor penyebab utama: Keterbatasan anggaran pembinaan yang menyebabkan cakupan desa menjadi terbatas dan Minimnya kapasitas dan kesiapan LKD, seperti PKK atau Karang Taruna, dalam menyiapkan data dan mengikuti fasilitasi.

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Pada sub kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga target kinerja tidak tercapai sepenuhnya. Faktor penyebab utama: Keterbatasan anggaran pelatihan dan pembinaan, sehingga jumlah lembaga yang dapat dibina lebih sedikit dari target.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sebagian program fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa tidak mencapai target, baik dari sisi jumlah desa yang difasilitasi maupun jumlah unit usaha BUMDes/masyarakat yang dapat dikembangkan. Faktor penyebab utama: Kurangnya inovasi usaha desa, sehingga unit usaha yang ada belum mampu memberikan kontribusi signifikan pada PADes.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Pada sub kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, terdapat beberapa komponen output yang belum sepenuhnya mencapai target, terutama terkait: Pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis TTG. Faktor Penyebab: Keterbatasan anggaran, sehingga ruang lingkup fasilitasi dan jumlah desa sasaran harus dikurangi.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Beberapa komponen output dalam kegiatan fasilitasi TP PKK yang tidak sepenuhnya mencapai target antara lain: Jumlah kegiatan pembinaan PKK tingkat desa/kelurahan tidak terpenuhi seluruhnya, Jumlah dokumen laporan pembinaan dan monitoring belum mencakup seluruh wilayah sasaran. Dan Kegiatan pendampingan Pokja PKK (Pokja I–IV) belum merata di seluruh desa.

Sejumlah program/kegiatan/sub kegiatan telah mencapai 100% target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kegiatan yang memenuhi target umumnya ditopang oleh:

1. Perencanaan yang realistis dan sesuai kapasitas anggaran.
2. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan yang baik antar perangkat daerah, kecamatan, desa, dan pihak terkait lainnya.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan teknis yang memadai.
4. Pelaksanaan yang tepat waktu, baik dalam penyiapan dokumen, pelaksanaan kegiatan, maupun pelaporan.

Pencapaian target ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan telah berjalan efektif serta mendukung pencapaian sasaran tahunan secara keseluruhan.

Kinerja pelaksanaan Renja tahunan memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian target jangka menengah dalam Renstra: Jika sebagian besar target tahunan tercapai atau melebihi target, maka jalur pencapaian sasaran Renstra berada pada kondisi on track dan berpotensi mencapai target 5 tahunan secara penuh, Jika terdapat beberapa target yang tidak tercapai, maka capaian Renstra berisiko mengalami keterlambatan, sehingga memerlukan peningkatan effort pada tahun berikutnya, Ketidakselarasan antara anggaran dan target kinerja pada tahun berjalan dapat menghambat pencapaian sasaran Renstra, terutama jika indikator bersifat kumulatif atau bertahap dan Hasil evaluasi tahunan menjadi dasar untuk penyempurnaan strategi pelaksanaan, termasuk fokus program prioritas, intensifikasi pendampingan, serta optimalisasi dukungan pendanaan. Secara keseluruhan, capaian tahunan menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa target Renstra 2025–2029 dapat dicapai sesuai rencana.

Untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya, diperlukan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan Perencanaan

1. Melakukan penajaman target kinerja agar sejalan dengan kemampuan anggaran dan kapasitas pelaksanaan.
2. Menyusun ulang strategi pelaksanaan pada kegiatan yang tidak mencapai target, termasuk revisi metode, jadwal, dan tahapan.
3. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor guna memperkuat dukungan pelaksanaan dari desa, kecamatan, dan perangkat daerah lainnya.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, termasuk memutakhirkan baseline, proyeksi capaian, dan kebutuhan teknis.

b. Kebijakan Penganggaran

1. Melakukan realokasi atau penambahan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator Renstra.
2. Mendorong efisiensi belanja sehingga ruang fiskal dapat digunakan untuk program prioritas.
3. Mengembangkan skema pendanaan alternatif, seperti CSR, kolaborasi dengan lembaga lain, atau sinkronisasi program pusat/Provinsi.
4. Memperkuat monitoring dan pengendalian pelaksanaan anggaran agar keterlambatan proses pengadaan dapat diminimalkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub-bab ini menyajikan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan perkembangan data selama periode 2020–2024. Analisis dilakukan untuk melihat dinamika kinerja dari tahun ke tahun, mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta menilai sejauh mana kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis kinerja ini dilakukan terhadap pencapaian kinerja dari sisi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bagian ini disajikan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam periode 2020–2024. Analisis mencakup perkembangan indikator urusan, pencapaian target tahunan, serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, bagian ini juga menyoroti faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi fluktuasi kinerja selama lima tahun terakhir, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tabel 2.2
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

No	Uraian	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi
		2024	2025	2026	2024	2025*	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1	Indeks Desa Membangun	Berkembang (0.6732)	Berkembang (0.6833)	Berkembang (0.6936)	(Maju) 0,7499	(Maju) 0,7599	(Maju) 0,7699
2	Indeks Ketahanan Sosial	0.7801	0.7918	0.8037	0,8037	0,8137	0,8237
3	Indeks Ketahanan Ekonomi	0.5695	0.5780	0.5867	0,5867	0,5967	0,6067
4	Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	0.6701	0.6801	0.6903	0,6903	0,7003	0,7103
5	Nilai evaluasi RB Dinas PMD Kab.Inhil atas komponen Pengungkit	15	17	19	15	17	19
6	Nilai AKIP Dinas PMD Kab.Inhil	B (64,75)	B (66,75)	B (68,75)	B (62,80)	CC (57,90)	CC (58,90)

Indeks Desa Membangun (IDM) Analisis & Faktor Penyebab Capaian Tinggi karena Adanya peningkatan signifikan pada ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, Program pemberdayaan desa berjalan baik: BUMDes, PKK, Posyandu, Karang Taruna, TTG, batas desa, dan peningkatan kapasitas aparatur, Peran aktif pemerintah desa dalam perencanaan dan pemutakhiran data IDM dan Intervensi program nasional (DD, ADD, P3-TGAI, Pamsimas, dsb.) juga meningkatkan indeks. Capaian sangat tinggi dan sudah melebihi Renstra, menunjukkan percepatan pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Indeks Ketahanan Sosial Analisis & Faktor Penyebab Capaian Tinggi karena Membaiknya indikator sosial: kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan partisipasi masyarakat, Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/PKK/Posyandu dan Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan organisasi masyarakat. Capaian tinggi, tren positif, serta memberikan kontribusi pada peningkatan IDM.

Indeks Ketahanan Ekonomi Analisis & Faktor Penyebab Capaian Tinggi karena Meningkatnya kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes dan unit usaha masyarakat, Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan PADesa dan Pemanfaatan TTG yang mulai efektif. Capaian baik, bahkan melampaui target tahunan dan Renstra.

Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Analisis & Faktor Penyebab Capaian Tinggi karena Program desa terkait sanitasi, lingkungan, dan mitigasi bencana berjalan baik, Pembinaan kelembagaan desa termasuk KPM, Karang Taruna, dan LPM dan Dukungan program nasional (air bersih, sanitasi, kebersihan lingkungan). Capaian tinggi dan konsisten meningkat.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Komponen Pengungkit) Analisis & Faktor Penyebab Capaian Sesuai Target karena penerapan manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, dan tata laksana berjalan sesuai perencanaan dan Inovasi dan budaya kerja mulai meningkat. Tercapai, stabil, namun masih berpotensi ditingkatkan.

Nilai AKIP Dinas PMD Analisis & Faktor Penyebab Capaian Tidak Sesuai Target karena Perencanaan kinerja belum sepenuhnya selaras dengan Renstra (alur cascading kurang optimal), Indikator kinerja belum SMART, sehingga sulit menunjukkan keterkaitan input–output–outcome, Pengukuran kinerja kurang akurat, terutama pada sub kegiatan yang tidak menyampaikan data secara tepat waktu, Pelaporan kinerja (LKjIP) lemah, terutama pada aspek analisis dan eviden pendukung, Evaluasi internal masih minim, belum optimal memonitor capaian triwulan dan Distribusi anggaran belum berbasis kinerja, dominan pada belanja operasional. Ini merupakan satu-satunya indikator yang tidak mencapai target dan menunjukkan tren menurun, sehingga menjadi isu strategis.

B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian ini menjelaskan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode 2020–2024 sebagai ukuran utama keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Analisis fokus pada pencapaian target, tren perkembangan kinerja, konsistensi output dan outcome yang dihasilkan, serta kontribusi IKK terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Evaluasi ini memberikan gambaran sejauh mana kinerja perangkat daerah mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.4
Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi
		2024	2025	2026	2024	2025*	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1	Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase peningkatan satatus desa berkembang dan maju serta mandiri	0,7499	0,7599	0,7699	0,7499	0,7599	0,7699

Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal Tercapai dan melebihi target secara signifikan (2024–2025). Pada 2026 capaian sesuai target. Pada tahun 2024–2025, seluruh desa berkembang berhasil dientaskan menuju kategori Maju, sehingga capaian jauh melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pembangunan desa berjalan efektif, termasuk: peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, pembinaan BUMDes dan usaha desa, peningkatan kapasitas aparatur, fasilitasi sarana prasarana desa, dan percepatan pemutakhiran data IDM dan pendampingan desa. Faktor Penyebab Capaian Tinggi: Konsistensi pendampingan terhadap desa berkembang untuk naik kelas, Pemanfaatan Dana Desa & ADD yang tepat sasaran, Peningkatan kapasitas aparatur desa sehingga perencanaan pembangunan lebih berkualitas, Kontribusi program nasional yang meningkatkan kualitas layanan dasar dan ekonomi desa, dan Data IDM yang terus diperbarui sehingga perubahan status desa teridentifikasi lebih cepat.

Persentase peningkatan satatus desa berkembang dan maju serta mandiri menunjukkan tren peningkatan, capaian tahun 2024 masih jauh dari target, yakni baru mencapai 13,19% dari target 25,45%. Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan status ke level Mandiri memerlukan waktu lebih lama, karena desa harus memenuhi indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif. Perbaikan terlihat signifikan pada 2025 dan 2026, sehingga menunjukkan adanya akselerasi intervensi yang tepat. Faktor Penyebab Rendahnya Capaian 2024: Ketergantungan desa pada Dana Desa, sehingga kapasitas fiskal asli desa belum kuat, Unit usaha BUMDes belum optimal pada banyak desa berkembang dan maju, Indikator ekonomi desa masih lemah, terutama diversifikasi usaha produktif, Belum semua desa memiliki data yang lengkap dan

valid pada sistem IDM dan EHDW dan Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, sehingga produktivitas masyarakat kurang meningkat. Faktor Penyebab Membaiknya Capaian 2025–2026: Pembinaan BUMDes yang lebih aktif, Program pemberdayaan yang lebih terarah dan berbasis data, Peningkatan kontinuitas pendampingan desa dan emenuhan layanan dasar desa yang meningkat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub-bab ini memaparkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai dasar penyusunan rancangan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Permasalahan dan Isu strategis diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 2024–2026, analisis hambatan operasional, serta keterkaitannya dengan target pembangunan daerah dan nasional.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2024–2026 menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator Indeks Desa Membangun. Namun, terdapat sejumlah aspek kritis yang memerlukan perhatian intensif untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan layanan. Hal kritis tersebut mencakup:

- 1) Meskipun indikator Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan tren peningkatan, distribusi kemajuan desa tidak merata. Masih terdapat desa-desa dengan kategori *tertinggal* atau *berkembang lambat* yang memerlukan intervensi lebih terarah
- 2) Masalah seperti rendahnya literasi perencanaan, administrasi keuangan, dan pengelolaan aset desa masih banyak ditemukan, sehingga berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan desa
- 3) Sebagian desa masih memprioritaskan kegiatan fisik ketimbang pemberdayaan ekonomi dan sosial. Hal ini menghambat akselerasi peningkatan status IDM terutama pada variabel ekonomi dan kelembagaan.

- 4) Ketidakteraturan pembaruan data, kurangnya validasi lapangan, serta keterbatasan SDM operator desa berdampak pada akurasi capaian kinerja dalam Indeks Desa Membangun maupun laporan kinerja lainnya.
- 5) Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan pelaksanaan program masih berbeda-beda antar wilayah, sehingga kualitas perencanaan dan keberlanjutan program belum maksimal.
- 6) Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes, Profil Desa, atau layanan digital desa masih terkendala jaringan internet, SDM, dan budaya kerja digital yang belum merata.
- 7) Masih ditemukan kekurangan dalam aspek pelaporan, monitoring, dan tindak lanjut hasil audit/monitoring sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dan kinerja perangkat desa.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas kinerja perangkat daerah. Berdasarkan analisis terhadap gambaran pelayanan, capaian kinerja (IKU, IKK, SPM), serta kondisi sumber daya yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dan dengan mengacu pada permasalahan pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sesuai tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir —yaitu "Pemberdayaan Masyarakat Desa" maka dapat dirumuskan Permasalahan pada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan pengelolaan keuangan desa
- 2) Ketimpangan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) antar desa dan belum optimalnya intervensi untuk percepatan desa berkembang menjadi desa maju/mandiri
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa (RT/RW, PKK, LPM, Karang Taruna, Posyandu, Lembaga Adat) dalam mendukung pembangunan desa

- 4) Minimnya transformasi digital desa dan rendahnya kualitas data desa (Profil Desa, IDM, Pendataan SDGs Desa, pemutakhiran data lainnya).
- 5) Pendayagunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan.
- 6) Belum optimalnya perkembangan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mesin ekonomi desa.
- 7) Belum maksimalnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk merangkum dan memetakan permasalahan pelayanan yang telah diuraikan secara naratif di atas, berikut disajikan Tabel Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemberdayaan Pedesaan yang Berorientasi pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan di Kabupaten Indragiri Hilir	Sebagian besar desa di Kabupaten Indragiri Hilir belum mencapai tingkat kemandirian, yang tercermin dari data status perkembangan desa dimana persentase Desa Mandiri baru mencapai 13,20%	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan desa (Pemdes, BPD, dll.) dan partisipasi Masyarakat
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) rata-rata baru mencapai 0,5867. Skor ini menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi desa yang masih cenderung rendah atau berada pada batas bawah level berkembang.	
		Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) rata-rata sebesar 0,6903. Meskipun demikian, kondisi ini tetap memerlukan upaya pemeliharaan, peningkatan kesadaran akan isu lingkungan strategis	

		Indeks Ketahanan Sosial (IKL) rata-rata sebesar 0,8037. Meskipun Tergolong baik, kondisi ini tetap memerlukan upaya mempertahankan bahkan ditingkatkan lagi menuju poin tertinggi	
--	--	---	--

Permasalahan tersebut diatas secara langsung memengaruhi efektivitas pencapaian visi dan misi kepala daerah, terutama dalam mewujudkan Mewujudkan peningkatan ekonomi Indragiri Hilir yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Dampak yang timbul antara lain:

- 1) Lambatnya peningkatan kemandirian desa dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi wilayah. Desa yang masih berkembang atau tertinggal menjadi penghambat percepatan pemerataan pembangunan ekonomi kabupaten.
- 2) Tidak optimalnya kontribusi desa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya ketahanan ekonomi desa (IKE) menyebabkan potensi ekonomi lokal tidak berkembang maksimal, sehingga struktur ekonomi desa tetap lemah dan tidak mampu menopang kesejahteraan masyarakat.
- 3) Lemahnya daya saing ekonomi desa dan rendahnya produktivitas masyarakat. Minimnya usaha produktif desa, lemahnya BUMDes, serta terbatasnya inovasi ekonomi membuat masyarakat kurang mampu memanfaatkan peluang ekonomi baru.
- 4) Efektivitas pemanfaatan Dana Desa tidak maksimal dalam mendorong penguatan ekonomi lokal. Porsi penggunaan Dana Desa yang masih dominan pada fisik berimplikasi pada lambatnya percepatan ekonomi produktif berbasis masyarakat.

Meskipun berbagai permasalahan telah teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dinamika tersebut tidak berdiri sendiri. Setiap hambatan yang muncul pada dasarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan saat ini dengan tuntutan pembangunan daerah yang terus berkembang. Dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, kondisi ini menuntut Perangkat Daerah untuk tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang bersifat operasional, tetapi juga mampu membaca arah perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut dijabarkan tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan, serta

peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah :

Tantangan :

- 1) Tersedianya juklak dan juknis.
- 2) Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat desa dari pusat dan propinsi kepada daerah kabupaten
- 3) Adanya perubahan dan perkembangan program desa hebat.
- 4) Pencapaian realisasi visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir.

Peluang :

- 1) Kesempatan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa oleh beberapa dinas terkait.
- 2) Terbatasnya alokasi dana/anggaran
- 3) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa masih terbatas

2.3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, serta perumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat serta tatakelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.
2. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Ekonomi Desa
3. Sinergi Program Pemberdayaan yang Adaptif terhadap Perubahan Lingkungan Dinamis

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini membahas hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD, yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara usulan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan aktual. Review ini menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa



perencanaan tahunan mampu menjawab isu strategis, kebutuhan pelayanan, serta target pembangunan daerah secara lebih tepat dan terukur.

Proses review dilakukan dengan membandingkan rumusan program, indikator, target, lokasi, dan pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan riil yang diidentifikasi melalui analisis kinerja, capaian urusan, serta dinamika isu pembangunan daerah. Dari proses ini diperoleh temuan-temuan penting yang menjadi dasar penyempurnaan perencanaan, termasuk identifikasi ketidaksesuaian, kekurangan informasi, kebutuhan penyesuaian pagu, maupun kebutuhan penambahan/rasionalisasi program dan kegiatan. Melalui review ini diharapkan Rancangan Awal RKPD dapat diselaraskan dengan kebutuhan aktual serta lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai hasil review tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir menyajikan perbandingan usulan program, kegiatan, indikator, target, dan kebutuhan pendanaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan internal Perangkat Daerah sbagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Inhil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	6.310.383.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Inhil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	6.855.951.578	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	116.740.349	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	121.238.551	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	89.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	102.299.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27.740.349	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	18.938.901	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan	100 %	5.444.369.472	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan	100 %	4.242.792.739	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Inhil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	5.427.374.472	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Inhil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	4.230.082.578	

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14 Bulan	16.995.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14 Bulan	12.710.161	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		22.670.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Inhil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	11.420.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Inhil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Inhil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	11.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Inhil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	140.541.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	1.007.886.688	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.525.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	920.215.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.675.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.842.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Inhil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.915.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Inhil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15.150.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.173.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.196.750	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.253.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.282.038	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Inhil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		145.608.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Inhil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		0	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	34.858.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	32.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	
	Pengadaan Mebel	Kab.Inhil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	22.500.000	Pengadaan Mebel	Kab.Inhil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Inhil	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	31.250.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Inhil	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Inhil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Inhil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Inhil	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 %	376.453.279	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Inhil	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 %	1.449.333.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	272.653.279	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.345.533.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Inhil	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	100 %	64.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Inhil	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	100 %	34.700.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Inhil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	16.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Inhil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Inhil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Inhil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	8.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.700.000	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab.Inhil	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	85 %	212.541.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab.Inhil	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	85 %	104.253.000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	197 Desa	212.541.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	197 Desa	104.253.000	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab.Inhil	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	40 Desa	106.270.500	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab.Inhil	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	40 Desa	0	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab.Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	106.270.500	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab.Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	104.253.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab.Inhil	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %	113.354.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab.Inhil	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %	0	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab.Inhil	Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi		113.354.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab.Inhil	Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi		0	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	56.677.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	0	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	56.677.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	0	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Inhil	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 %	3.726.570.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Inhil	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 %	6.383.352.154	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Desa dengan Administrasi Baik	197 Desa	3.726.570.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Desa dengan Administrasi Baik	197 Desa	6.383.352.154	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	1.200.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	3.366.131.404	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	67.528.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Inhil	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	80.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Inhil	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	0	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	80.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	0	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	80.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	0	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	197 Dokumen	250.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	197 Dokumen	73.175.750	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	626.570.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	0	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	0	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	197 Dokumen	1.010.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	197 Dokumen	2.876.517.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	0	

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Inhil	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	40 Desa	80.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Inhil	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	40 Desa	0	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Inhil	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	100 %	595.115.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Inhil	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	100 %	366.649.150	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Inhil	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	100 %	595.115.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Inhil	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	100 %	366.649.150	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	13.830.300	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Inhil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	80.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Inhil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	28.814.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	29 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	29 Dokumen	1.410.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	80.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Inhil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.162.850	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	205.115.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	321.432.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada subbab ini disajikan hasil penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Usulan tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah lain yang menyampaikan aspirasi melalui mekanisme musrenbang atau kanal aspirasi lainnya. Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usulan dievaluasi secara objektif, relevan dengan prioritas pembangunan daerah, serta selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penelaahan dilakukan melalui kompilasi hasil musrenbang, pengumpulan masukan dari stakeholder, serta observasi lapangan. Selanjutnya, usulan tersebut dianalisis kesesuaiannya dengan isu-isu strategis dan kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, sehingga dapat dipetakan program/kegiatan mana yang layak diakomodir, ditunda, atau diarahkan untuk ditangani oleh instansi lain yang lebih berwenang.

Tabel berikut memuat daftar usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang telah melalui proses penelaahan. Informasi dalam tabel disusun untuk memberikan gambaran mengenai jenis usulan, lokasi kegiatan, indikator kinerja yang relevan, besaran/volume kebutuhan, serta catatan penting yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Catatan tersebut dapat berupa tingkat urgensi, kesesuaian dengan prioritas daerah, ketersediaan anggaran, ataupun rekomendasi tindak lanjut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Subbab ini menjelaskan hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional yang relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini dimaksudkan sebagai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di tahun perencanaan telah mendukung dan selaras dengan agenda strategis nasional dan program prioritas Pemerintah Pusat. Hasil telaahan ini menjadi dasar untuk menyesuaikan fokus program Perangkat Daerah agar terjadi sinkronisasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagai acuan utama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir telah menelaah Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tema dan kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Dimana arah kebijakan RPJMN teknokratik tahun 2025 – 2029 diarahkan pada Penguatan Fondasi Transformasi., dengan prioritas nasional tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
		Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila
		Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi
		Penguatan pencapaian Ketahanan Energi
		Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang
		Peningkatan ketahanan pangan
		Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
		Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah
		Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
3.	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Peningkatan Produksi Pertanian
		Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah
		Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
		Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua
		Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
		Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
		Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital
		Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)
		Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga
5.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat
		Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
		Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas
		Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
		Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan
		Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
		Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
		Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
		Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
		Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
		Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat
		Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

3.1.2 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Prioritas Nasional tersebut, dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir yang berfokus pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung dan mempercepat pencapaian Prioritas Nasional yang relevan sebagai berikut :

“Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi Optimalisasi Pembangunan dan Pemberdayaan Pedesaan yang Berorientasi pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini menetapkan Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2026. Perumusan ini bersifat hierarkis dan fungsional, diturunkan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029, yang sebelumnya telah diselaraskan dengan hasil analisis isu strategis di Bab II.

Slain itu, Tujuan dan Sasaran tahunan ini telah disinkronkan dan diperkuat oleh Tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026. Keterkaitan ini menjamin bahwa semua upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir akan terarah pada pencapaian sasaran makro daerah yang disepakati, termasuk mengatasi isu-isu strategis lokal dan mendukung Prioritas Nasional yang relevan

Berikut disajikan matriks Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk Tahun 2026, yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja .

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2026

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kinerja Awal Tahun Perencanaan (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renja Tahun 2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemandirian Desa		Indeks Desa	Indeks	0,7499 (maju)	0,7699 (maju)
		Persentase Desa Mandiri	Persen	13,2	18,27
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Persentase desa dengan nilai evaluasi kinerja pemerintahan desa kategori Baik	Persen	32	50
		Tingkat kepatuhan desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa	Desa	50	80
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat serta Kinerja Kelembagaan Ekonomi Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju	Persen	3,05	36,55
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada hasil	Nilai AKIP Dinas PMD Kab.Inhil	Nilai	56,90 (CC)	58,90 (CC)

3.3 Program dan Kegiatan

Subbab ini menyajikan penjelasan naratif mengenai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2026. Perumusan ini merupakan tindak lanjut operasional yang wajib menjamin tercapainya Sasaran Perangkat Daerah dan memanfaatkan alokasi sumber daya secara efektif.

Dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir mempertimbangkan faktor-faktor strategis berikut:

- 1) Program yang dipilih wajib mendukung pencapaian Prioritas Nasional, visi dan misi kepala daerah serta sasaran yang tertuang dalam RKPD.

- 
- 2) Program diarahkan untuk mendayagunakan potensi ekonomi daerah dan mengatasi ketertinggalan
 - 3) Program difokuskan pada upaya mengatasi Isu-isu Penting yang timbul dari evaluasi kinerja tahun lalu

Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan pelaksanaan 4 Program yang terurai menjadi 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang tersebar di beberapa Kawan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan untuk seluruh rencana kerja adalah sebesar Rp. 13.710.205.882. Kebutuhan ini dirinci lebih lanjut menurut sumber pendanaannya (APBD Murni, DAK, dll.)

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab.Inhil	100 %	6.310.383.000	APBD		100 %	6.929.266.271
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Kab.Inhil	100 %	116.740.349	APBD		100 %	127.740.349
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Inhil	6 Dokumen	89.000.000	APBD		6 Dokumen	100.000.000
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Inhil	1 Laporan	27.740.349	APBD		1 Laporan	27.740.349

2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Kab.Inhil	100 %	5.444.369.472	APBD		100 %	5.544.369.472
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Inhil	1 Dokumen	5.427.374.472	APBD		1 Dokumen	5.527.374.472
2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Inhil	14 Bulan	16.995.000	APBD		14 Bulan	16.995.000
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	Kab.Inhil	100 %	22.670.000	APBD		100 %	35.670.000
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Inhil	45 Paket	11.420.000	APBD		133 Paket	22.420.000
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Inhil	10 Orang	11.250.000	APBD		10 Orang	13.250.000
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab.Inhil	100 %	140.541.900	APBD		100 %	326.425.171
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Inhil	12 Dokumen	8.525.000	APBD		12 Dokumen	3.173.400
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Inhil	12 Laporan	100.000.000	APBD		12 Laporan	24.253.000
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Inhil	2 Paket	8.675.000	APBD		3 Paket	15.675.000
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Kab.Inhil	5 Paket	5.915.500	APBD		5 Paket	10.915.500

		Penggandaan yang Disediakan							
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Inhil	1 Paket	3.173.400	APBD		1 Paket	10.525.000
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Inhil	4 Paket	14.253.000	APBD		4 Paket	261.883.271
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Inhil	100 %	145.608.000	APBD		100 %	386.608.000
2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab.Inhil	4 Unit	34.858.000	APBD		4 Unit	104.858.000
2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab.Inhil	2 Unit	32.000.000	APBD		2 Unit	132.000.000
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Inhil	5 Unit	22.500.000	APBD		5 Unit	42.500.000
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Inhil	5 Unit	31.250.000	APBD		5 Unit	45.000.000
2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Inhil	3 Unit	25.000.000	APBD		3 Unit	62.250.000
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Kab.Inhil	100 %	376.453.279	APBD		100 %	386.453.279
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Inhil	1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	3.000.000

2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Inhil	12 Laporan	100.800.000	APBD		12 Laporan	110.800.000
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Inhil	12 Laporan	272.653.279	APBD		12 Laporan	272.653.279
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab.Inhil	100 %	64.000.000	APBD		100 %	122.000.000
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Inhil	19 Unit	16.000.000	APBD		19 Unit	32.000.000
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kab.Inhil	1 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	80.000.000
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kab.Inhil	3 Unit	8.000.000	APBD		3 Unit	10.000.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Kab.Inhil	85 %	212.541.000	APBD		90 %	233.352.023
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang tertata dengan baik	Kab.Inhil	197 Desa	212.541.000	APBD		197 Desa	233.352.023
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab.Inhil	40 Desa	106.270.500	APBD		40 Desa	116.675.000
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab.Inhil	1 Unit	106.270.500	APBD		1 Unit	116.677.023
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Kab.Inhil	100 %	113.354.000	APBD		100 %	124.453.095

2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi	Kab.Inhil		113.354.000	APBD			124.453.095
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab.Inhil	20 Kecamatan	56.677.000	APBD		20 Kecamatan	62.226.547
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Inhil	1 Dokumen	56.677.000	APBD		1 Dokumen	62.226.548
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Kab.Inhil	100 %	3.726.570.000	APBD		100 %	4.091.458.353
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi Baik	Kab.Inhil	197 Desa	3.726.570.000	APBD		197 Desa	4.091.458.353
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Inhil	5 Dokumen	1.200.000.000	APBD		6 Dokumen	1.200.000.000
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Inhil	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	80.000.000
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab.Inhil	100 Orang	80.000.000	APBD		100 Orang	80.000.000
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab.Inhil	1 Laporan	80.000.000	APBD		1 Laporan	65.000.000
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Inhil	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab.Inhil	197 Dokumen	250.000.000	APBD		197 Dokumen	250.000.000
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	Kab.Inhil	1 Laporan	626.570.000	APBD		1 Laporan	1.081.458.353

		Pemberhentian Kepala Desa							
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab.Inhil	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Inhil	197 Dokumen	1.010.000.000	APBD		197 Dokumen	1.010.000.000
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Inhil	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab.Inhil	40 Desa	80.000.000	APBD		40 Desa	65.000.000
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Inhil	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kab.Inhil	100 %	595.115.000	APBD		100 %	653.385.885
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	Kab.Inhil	100 %	595.115.000	APBD		100 %	653.385.885
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, R PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Kab.Inhil	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000

	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Inhil	6 Lembaga	80.000.000	APBD		6 Lembaga	80.000.000
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab.Inhil	29 Dokumen	150.000.000	APBD		29 Dokumen	160.000.000
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Inhil	1 Laporan	80.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Inhil	1 Laporan	205.115.000	APBD		1 Laporan	213.385.885

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.710.205.882,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.710.205.882,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.710.205.882,00	
1,	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	6.855.951.578,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	121.238.551,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	102.299.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	18.938.901,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	100 Persen	4.242.792.739,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.230.082.578,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	12.710.161,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran</i>	100 Persen	1.007.886.688,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	3.196.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	27.282.038,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	34.842.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket	15.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	7.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	920.215.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor</i>	100 Persen	1.449.333.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	100.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.345.533.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100 Persen	34.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	18 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	9.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	85	104.253.000,00	

	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	<i>Jumlah Desa yang tertata dengan baik</i>	197 Desa	104.253.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi</i>	1 Unit	104.253.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4,	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	6.383.352.154,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa dengan Administrasi Baik</i>	197 Desa	6.383.352.154,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	5 Dokumen	3.366.131.404,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	1 Dokumen	67.528.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>	197 Dokumen	73.175.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa</i>	197 Dokumen	2.876.517.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5,	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	366.649.150,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	100 Persen	366.649.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen	13.830.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	2 Lembaga	28.814.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	29 Dokumen	1.410.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	1 Laporan	1.162.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	1 Dokumen	321.432.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H				13.710.205.882,00	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 merupakan puncak dari tahapan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dokumen ini telah mengakomodir hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis, serta menyelaraskan program pembangunan dengan rencana kerja Pemerintah dan Pemerintah RKPD Indragiri Hilir Tahun 2026.

Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta target dan kebutuhan pendanaan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan instrumen pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.1 Catatan Penting

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius selama proses pelaksanaan Renja ini:

- a) Pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan wajib difokuskan pada pencapaian Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan pada Bab III. Program yang memiliki kontribusi terbesar terhadap capaian SPM dan pengentasan Isu-isu Penting (Bab II) harus diutamakan dalam realisasi anggaran.
- b) Apabila ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam APBD tidak sesuai dengan kebutuhan ideal (Pagu Indikatif) yang tercantum dalam Renja, maka pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan akan disesuaikan secara proporsional. Penyesuaian wajib memperhatikan KUA dan PPAS, dengan tetap mempertahankan program yang mendukung pemenuhan SPM sebagai prioritas utama.
- c) Pelaksanaan program/ kegiatan dan sub harus responsif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang mungkin terjadi setelah Renja ini ditetapkan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada kaidah-kaidah berikut untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas:

a) Konsistensi

Pelaksanaan wajib konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, dan RKP (Pusat), serta mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Tahun 2026.

b) Transparan dan Akuntabel

Setiap alokasi anggaran dan realisasi program wajib dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Efisiensi dan Efektivitas

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja harus diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian target kinerja.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Setelah penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

- a) Renja ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh Bidang/Unit Kerja dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026
- b) Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar bagi proses pengendalian, pelaporan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, baik secara triwulanan maupun tahunan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rencana kerja yang telah disepakati demi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

H. AHMAD KHUSAIRI, S.Sos, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP 19720913 199201 1 001